

HASIL PENELITIAN

PERSEPSI PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR 45 TERHADAP IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN RELOKASI TEMPAT USAHA OLEH PEMERINTAH KOTA  
MANADO

Gladis Alen Atteng<sup>1</sup>, J.O.Waani<sup>2</sup>, R.J. Poluan<sup>3</sup> & E. D. Takumansang<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota, Jurusan Arsitektur Universitas Sam Ratulangi  
<sup>2,3,4</sup>Staf Pengajar Program Studi S1 Perencanaan Wilayah & Kota, Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi

**Abstrak.** Keberadaan PKL (Pedagang Kaki Lima) seringkali dianggap menghambat ruang gerak masyarakat di pusat kota, kawasan Pusat Kota tampak kotor karena sampah, terjadi kerawanan sosial, dan tata ruang kota menjadi tidak teratur. Hal tersebut merupakan fenomena lama yang dialami oleh Pemerintah di kota-kota besar. Demikian juga halnya dengan kondisi Kota Manado, dimana Berdasarkan pengamatan ditemui masalah terkait dengan implementasi kebijakan relokasi, yaitu: (a) PKL belum memahami maksud dan tujuan adanya implementasi kebijakan relokasi tempat usaha dari Pemerintah, sehingga masih ada pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan perdagangan ditempat yang tidak seharusnya diperuntukan bagi sektor informal. (b) Pemerintah kurang maksimal dalam proses implementasi kebijakan relokasi tempat usaha PKL sehingga lokasi peruntukan kawasan perdagangan sektor informal yang ditetapkan oleh Pemerintah tidak terlaksana secara optimal. tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah terkait kegiatan penataan pedagang kaki lima di Pusat Kota Manado dan (2) mengetahui persepsi pedagang kaki lima di Pusat Kota Manado terhadap implementasi kebijakan relokasi tempat usaha oleh Pemerintah. Berdasarkan hasil analisis deskriptif maka dapat penulis menyimpulkan bahwa: (a) implementasi Kebijakan Relokasi oleh Pemerintah mencakup 5 (lima) aspek yaitu : Lingkungan, ekonomi, transportasi, hukum, dan sosial dalam program penataan sektor informal sudah diimplementasikan; (b) berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi disetiap aspek penelitian lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05) maka  $H_0$  diterima – artinya implementasi kebijakan relokasi oleh Pemerintah berpengaruh terhadap persepsi pedagang kaki lima di Pusat Kota Manado.

Kata Kunci: Persepsi, Pedagang Kaki Lima, Pasar 45, Kota Manado

### PENDAHULUAN

Pemanfaatan ruang kota tidak lepas dari peruntukan kawasan yang memiliki fungsi sosial – ekonomi, dan Pusat Kota merupakan tempat terkonsentrasinya kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan perkembangan yang sangat dinamis. Hal itu disebabkan karena Pusat Kota, merupakan tempat terkonsentrasinya berbagai fasilitas pemenuhan kebutuhan penduduk yang berskala pelayanan tinggi (Jayadinata, 1999:160).

Sejak terjadinya krisis ekonomi, banyak masyarakat golongan menengah kebawah mengambil alternatif untuk berprofesi dibidang sektor informal sebagai

PKL (Pedagang Kaki Lima) disebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi serta kurangnya ketersediaan lapangan kerja.

Pada umumnya Pusat Kota merupakan lokasi strategis untuk perdagangan sektor informal yaitu PKL (Pedagang Kaki Lima). Aktivitas jasa sektor informal hadir sebagai penunjang yang bersifat komplementer pada ruang-ruang yang strategis secara ekonomi ditengah kegiatan sektor formal/modern, yang bersifat permanen seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Pengertian PKL (Pedagang Kaki Lima) yang dimaksudkan disini adalah pedagang kecil yang berjualan dipinggir jalan raya seperti: taman-taman, trotoar atau

emperan toko, tanpa izin usaha dari Pemerintah.

Demikian juga halnya dengan kondisi Kota Manado, dimana berbagai kegiatan sektor informal PKL terkonsentrasi di pusat kota dan ini akan berdampak negatif terhadap kemampuan daya dukung lingkungan dalam memenuhi kebutuhan fasilitas kehidupan penduduk baik ekonomi maupun sosial. Sehingga Pemerintah Kota Manado menetapkan kebijakan relokasi tempat usaha PKL yang diatur dalam Peraturan Walikota No 123 Tahun 2011.

Sejauh ini Pemerintah Kota Manado telah berupaya mencari solusi untuk menata PKL yaitu mengalihkan kawasan perdagangan sektor informal di Pusat Kota ke kawasan reklamasi Pasar Bersehati dengan cara implementasi kebijakan relokasi tempat usaha. Namun pada kenyataannya implementasi kebijakan dari Pemerintah belum menemukan solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah tersebut.

Melihat adanya perbedaan sudut pandangan dan kepentingan antara Pemerintah dan Pedagang Kaki Lima, maka dalam Penelitian ini, penulis mencoba untuk melakukan analisis persepsi PKL dengan mengambil studi tentang “Persepsi Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Manado Terhadap Implementasi Kebijakan Relokasi Tempat

Berdasarkan pengamatan ditemui masalah terkait dengan implementasi kebijakan relokasi, yaitu:

(a) PKL belum memahami maksud dan tujuan adanya implementasi kebijakan relokasi tempat usaha dari Pemerintah, sehingga masih

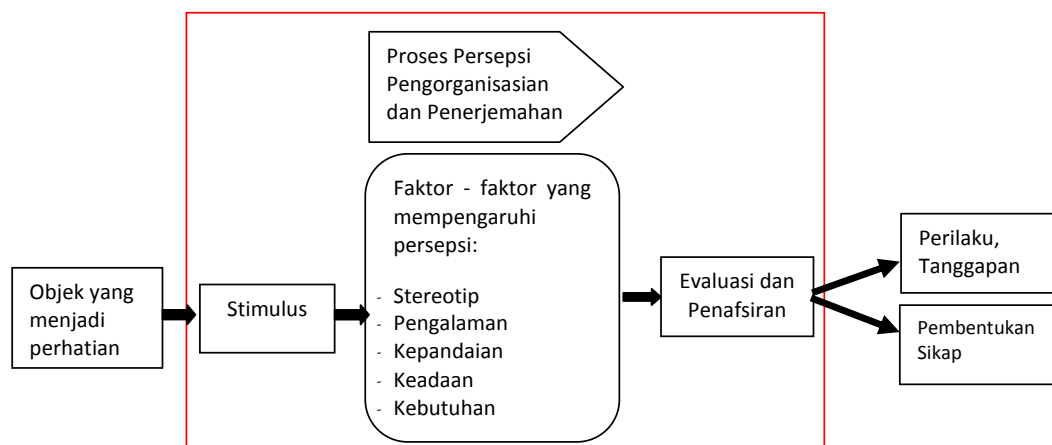
ada pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan perdagangan ditempat yang tidak seharusnya diperuntukan bagi sektor informal. (b) Pemerintah kurang maksimal dalam proses implementasi kebijakan relokasi tempat usaha PKL sehingga lokasi peruntukan kawasan perdagangan sektor informal yang ditetapkan oleh Pemerintah tidak terlaksana secara optimal.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah terkait kegiatan penataan pedagang kaki lima di Pusat Kota Manado dan (2) mengetahui persepsi pedagang kaki lima di Pusat Kota Manado terhadap implementasi kebijakan relokasi tempat usaha oleh Pemerintah.

### Persepsi sebagai Hasil Interaksi Manusia

Manusia mengerti dan menilai lingkungan dengan menangkap objek-objek melalui alat indera, seperti: penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan perasa. Hal itu bermula karena adanya stimulus, selanjutnya individu mengalami proses penginderaan dan mengkoordinasikan didalam pusat syaraf yang lebih tinggi (otak) sehingga manusia dapat menilai serta memberi tanggapan tersebut (Sarwono, 1992:45).

Selanjutnya pendapat tersebut dikembangkan menjadi teori tentang persepsi “SOR” (*Stimulate – Organism – Response*). Menurut teori ini, pengaruh yang terjadi pada pihak penerima pada dasarnya merupakan suatu reaksi tertentu



Gambar 1. Bagan Proses Terjadinya Persepsi

dari stimulus (rangsang) tertentu. Dengan demikian besar atau kecil bentuk pengaruh dan persepsi (respon) tergantung pada stimulus.

### **Konsep Implementasi Kebijakan Publik**

Dalam setiap rumusan kebijakan apakah yang menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selaludiiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Karena betapapun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti. Seperti yang dikemukakan oleh Wahab (1990:51) bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan.

Kebijaksanaan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan. Kemudian secara lebih detail Gibson (dikutip oleh Walgito, 2002 : 35) berpendapat mengenai proses terjadinya persepsi yaitu mencakup penerimaan stimulus (*inputs*), pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. Dari beberapa pendapat diatas, maka proses terjadinya persepsi dapat kita visualisasikan dalam bagan sebagai berikut :

### **Faktor Pengaruh Kegiatan Relokasi Sektor Informal**

Relokasi yaitu suatu upaya menempatkan kembali suatu kegiatan tertentu ke lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Wibowo Rian (2006:15) menerangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi relokasi PKL, yaitu : (a)kestrategisan lokasi, yaitu konsumen mudah menjangkau lokasi usaha PKL karena adanya aksesibilitas yang mendukung, (b)faktor visual, memberikan kesan harmonis dan asri sehingga mudah menarik minat konsumen, (c)hirarki pembangunan, jangkauan pelayanan yang efektif dan efisien, (d)sewa atau penjualan tanah/ kios yang murah sehingga tidak memberatkan pedagang.

### **Sektor Informal (PKL) dan Konsep Penataannya**

Istilah kaki lima berasal dari zaman Rafles, Gubernur Jenderal pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu kata "*five feet*" yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar 5 (lima) kaki. Ruang yang digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan pedagang kaki lima (Widjayanti, 2000: 28).

Menurut Sethurahman (1991:90) bahwa istilah pedagang kaki lima biasanya untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang, kelompok maupun individu masyarakat yang masuk ke kota dan bertujuan untuk mencari kesempatan kerja serta pendapatan daripada memperoleh keuntungan".

Sampai saat ini ILO yang relatif berhasil merumuskan definisi teoritis tentang sektor informal. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia definisinya menjadi sebagai berikut: Sektor informal adalah cara melakukan pekerjaan apapun dengan karakteristik mudah dimasuki, bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik sendiri, beroperasi dalam skala kecil, padat karya dan teknologi yang adaptif, memiliki keahlian di luar sistem."

### **Kebijakan Pemerintah Kota Manado tentang Sektor Informal (PKL)**

Pengembangan sektor informal tidak dapat diabaikan dan dipisahkan dari aktivitas perekonomian di wilayah Kota Manado karena sudah terbukti aktivitas kegiatan sektor informal turut memberikan kontribusi yang positif bagi aktivitas perekonomian kota serta dapat meningkatkan PDRB Kota Manado.

### **METODOLOGI**

Wilayah pengamatan penelitian terletak di Pusat Kota Manado (Pasar 45) yang merupakan Pusat Kota Lama. Pusat Kota Manado terletak di Kecamatan Wenang yang merupakan pusat kegiatan karena dikawasan tersebut merupakan jalur yang ramai dengan aksesibilitas yang tinggi dimana terletak pertokoan serta perkantoran. Dalam melaksanakan penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan

cara menyebarkan kuesioner atau wawancara langsung.

Untuk melihat persepsi PKL dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Persepsi pedagang terhadap implementasi kebijakan relokasi dinyatakan dengan menggunakan program SPSS for Windows.

Hipotesis terhadap penelitian ini adalah :

H0 : Implementasi kebijakan relokasi oleh Pemerintah berpengaruh terhadap persepsi pedagang kaki lima di Pusat Kota Manado.  
H1: Implementasi kebijakan relokasi oleh Pemerintah tidak berpengaruh terhadap persepsi pedagang kaki lima di Pusat Kota Manado.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji deskriptif dari kuesioner, skor rata-rata disemua item pertanyaan sebanyak 3,402 dan dikategorikan setuju (S), namun sebagian responden tidak setuju dalam menanggapi kebijakan tersebut. Namun pada kenyataannya responden belum sepenuhnya setuju dengan implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari jumlah PKL yang menempati lokasi arahan relokasi sebanyak 48 orang (22%) dan 175 orang (78%) lainnya belum menaati peraturan yang berlaku.

#### Karakteristik Sektor Informal di Pasar 45 (Pusat Kota) Manado

Aktivitas PKL di pusat Kota Manado jika ditinjau dari sudut pola penyebarannya maka akan tampak dua pola persebaran yaitu pola penyebaran memanjang (*linier concentration*) dan pola penyebaran mengelompok (*focus agglomeration*) sesuai dengan teori penyebaran aktivitas fisik sektor informal yang dikemukakan oleh McGee dan Yeung (1977).

Dimana dalam pola penyebaran memanjang (*linier concentration*) PKL terkonsentrasi di sepanjang jalur pejalan kaki, mereka memilih lokasi tersebut karena melihat aksesibilitas yang tinggi dan berpotensi untuk mendatangkan konsumen. Sedangkan PKL dengan pola penyebaran mengelompok (*focus agglomeration*) dapat dijumpai pada ruang terbuka seperti taman, lahan parkir, gang kecil, ataupun diantara sektor formal dimana PKL mempertimbangkan faktor aglomerasi yaitu

dengan cara berkelompok dengan barang dagangan sejenis untuk lebih mempermudah pembeli.

#### Persepsi PKL berdasarkan Aspek Lingkungan

Pemerintah menetapkan kawasan khusus perdagangan sektor informal bagi pedagang kaki lima yang menempati fasilitas umum dan fasilitas sosial masyarakat di Pusat Kota ke kawasan arahan relokasi yaitu di Kompleks Kalimas Pelabuhan Manado. Selain itu untuk menjaga kebersihan kawasan tersebut Pemerintah menetapkan biaya retribusi kebersihan kepada pedagang dan dikelola oleh pengelola pasar.

Respon PKL terhadap implementasi kebijakan Pemerintah dalam aspek lingkungan adalah baik dan setuju terhadap kebijakan tersebut. Hal yang sama dengan konteks persepsi itu sendiri dimana dalam siklus kehidupan manusia tidak pernah lepas dengan lingkungannya dan sesuai dengan pendapat Sarwono (1992) manusia mengerti dan menilai lingkungan dengan menangkap objek-objek dengan alat indera. Selebihnya Wibowo Rian (2006) memaparkan salah satu faktor yang mempengaruhi lokasi dagang PKL adalah kenyamanan. Maka dari itu lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan alasan bagi PKL untuk memilih lokasi dagangnya. Lokasi Pelabuhan Kalimas yang terletak disamping Pasar membuat kesan yang kotor dengan bau busuk, sehingga setiap orang dapat memberikan tanggapan yang buruk terhadap kawasan tersebut, begitu juga dengan PKL.

#### Persepsi PKL berdasarkan Aspek Ekonomi

Pemerintah memberikan bantuan usaha kepada PKL berupa tempat usaha di lokasi Pelabuhan Kalimas Manado. Respon terhadap implementasi kebijakan Pemerintah dalam aspek ekonomi yang paling tinggi adalah indikator kebutuhan dimana skor yang dimiliki indikator kebutuhan dalam persepsi PKL adalah 4,90 sehingga dikategorikan sangat setuju (SS). Responden sangat setuju dengan adanya bantuan dari Pemerintah. Seperti yang dikemukakan oleh Wibowo Rian (2006) salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam relokasi PKL adalah adanya sewa atau jual tanah/kios yang murah

sehingga tidak memberatkan pedagang dan juga tersedianya lapangan kerja baru yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki pedagang.

#### **Persepsi PKL berdasarkan Aspek Transportasi**

Jalur sirkulasi kendaraan yang melintas di Kawasan Pelabuhan Kalimas Manado hanya yang mengarah satu jalur dan mengarah ke wilayah Manado bagian utara. Pada umumnya jenis kendaraan pribadi, truk angkutan, dan angkutan umum.

Implementasi kebijakan Pemerintah dalam aspek transportasi yang paling berpengaruh adalah emosi dan kebutuhan karena kedua aspek memiliki skor yang hampir sama dimana skor untuk indikator emosi sebesar 4,48 dan responden merasa nyaman dengan kondisi sirkulasi di Kawasan Pelabuhan Kalimas.

Sedangkan aspek kebutuhan memiliki skor 4,61 karena responden menilai bahwa aksesibilitas ke kawasan perdagangan sektor informal sangat penting sehingga dikategorikan sangat setuju (SS). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wibowo Rian (2006) dimana faktor penting yang perlu diperhatikan dalam lokasi relokasi adalah akses yang memadai (minimal dua akses), baik itu akses masuk kedalam pasar maupun akses untuk keluar. Namun nampaknya aksesibilitas ke kawasan Pelabuhan cukup sulit karena hanya mempunyai 1 (satu) akses atau jalan searah.

#### **Persepsi PKL berdasarkan Aspek Hukum**

Usaha penertiban PKL dilakukan oleh Pemerintah setiap 3 bulan sekali. Dan dilakukan oleh SATPOL PP yang bekerjasama dengan TNI POLRI beserta Kejaksaan. Dan diberikan sanksi kepada pedagang yang tidak menaati peraturan diberikan sanksi berupa denda sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau 3 (tiga) bulan kurungan penjara.

Dalam implementasi kebijakan Pemerintah aspek hukum yang paling tinggi adalah kebutuhan dimana skor untuk indikator tersebut 4,66 sehingga dikategorikan sangat setuju (SS). Itu berarti responden setuju dengan adanya pendataan pedagang dan jenis dagang. Sesuai dengan pendapat Wahab (1990) salah satu faktor yang mempengaruhi kejelasan implementasi adalah adanya aturan

yang dipegang dan prosedur yang harus dilalui. Dimana untuk melakukan kegiatan penataan sektor informal, Pemerintah perlu mendata PKL agar kebutuhan mereka dapat dipertimbangkan dan disalurkan dengan tepat.

Dari aspek hukum dapat dilihat bahwa persepektif kepatuhan terhadap kebijakan masih kurang. Padahal perspektif kepatuhan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Wibowo Rian (2006)

#### **Persepsi PKL berdasarkan Aspek Sosial**

Proses sosialisasi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku petugas yang diberi tanggung jawab untuk mengontrol seluruh kegiatan PKL di Pusat Kota Manado. Pemerintah juga mengizinkan PKL untuk melakukan kegiatan diantara sektor formal.

Dalam implementasi kebijakan Pemerintah aspek sosial yang memiliki skor tertinggi adalah kebutuhan dimana skor untuk indikator tersebut 3,64 dimana responden setuju (S) dengan adanya sosialisasi karena melalui kegiatan tersebut respon pedagang juga diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan.

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah masih kurang sehingga hubungan sosial yang terjalin diantara Pemerintah dan PKL kurang baik. Untuk mensukseskan program dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah maka diperlukan kerjasama dengan menciptakan suasana yang kondusif sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Budi Sutrisno (2007).

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis deskriptif maka dapat penulis menyimpulkan bahwa: (a) implementasi Kebijakan Relokasi oleh Pemerintah mencakup 5 (lima) aspek yaitu : Lingkungan, ekonomi, transportasi, hukum, dan sosial dalam program penataan sektor informal sudah diimplementasikan; (b) berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi disetiap aspek penelitian lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05) maka  $H_0$  diterima – artinya implementasi kebijakan relokasi oleh Pemerintah berpengaruh terhadap persepsi pedagang kaki lima di Pusat Kota Manado.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S, (1991), *Pengantar Psikologi Jilid I*, Erlangga, Jakarta
- Husein, U, (2003), *Metode Riset Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Button Jayadinata, J.T, (1999) *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah Edisi ketiga*, ITB, Bandung.
- Kamus Tata Ruang , (1997) *Dirjen Cipta karya Departemen Pekerjaan Umum*, Edisi I
- Mc Gee, TG and YM Yeung, (1997) *Hawkers In Southeast Asian Cities Planning For The Bazaar Economy*, International Development Research Centre, Ottawa.
- Moh, N, (2003) *Metode Penelitian, Cetakan Keempat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sarwono, W, (1992), *Psikologi Lingkungan*, PT Grasindo, Jakarta.
- Sethuraman, S. V, (1991). *Sektor Informal di Negara Sedang Berkembang*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, (2007) *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sutrisno Budi, (2007), *Pola Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta Berdasarkan Panduan Kepentingan*, Universitas Muhamadya, Surakarta.
- Wahab, A, (1990) *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Walgito, B, (2002) *Pengantar Psikologi Umum*. Andi , Yogyakarta.
- Wibowo Rian, (2006), *Model Relokasi PKL Dalam Perspektif Keindahan*, Program Pasca Sarjana, Undip.
- Widjayanti Retno, 2000. *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*, Program Pasca Sarjana, ITB.
- Wirartha, I Made, (2006), *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Andi, Yogyakarta.
- Wirawan, (1992), *Psikologi Lingkungan*, PT Grasindo, Jakarta.